



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5204 (021) 3450959, FAKSIMILE (021) 3846402, 3454640  
SITUS [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S - **3646** /PB.1/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Kesehatan  
Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2017 (MOFIN 2017)

12 April 2017

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
di seluruh Indonesia

Menunjuk hal tersebut pada pokok nota, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Tujuan sosialisasi pelaksanaan survei MOFIN 2017 adalah dalam rangka menjelaskan maksud dan tujuan survei dan meningkatkan partisipasi responden survei seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan.
2. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki target skor MOFIN (*Ministry of Finance Organizational Fitness Index*) sebesar 78. Berdasarkan hasil survei, nilai praktik kesehatan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan di tahun 2015 adalah 78 (termasuk 2 unit eselon I Kemenkeu yang memperoleh nilai paling tinggi di antara eselon I lainnya di lingkungan Kemenkeu).
3. Indeks Kesehatan Organisasi adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam kontrak kinerja Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Target untuk tahun 2017 telah ditingkatkan menjadi 82 dari sebelumnya 78 pada tahun 2015.
4. Terkait hal tersebut diatas, akan dilaksanakan *video conference* dengan agenda sosialisasi pelaksanaan survei MOFIN 2017. *Video Conference* akan diselenggarakan pada Kamis, 13 April 2017 pukul 11.30 WIB s.d. selesai melalui Room 204.
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar menyertakan Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala KPPN setempat.
6. Mengingat pelaksanaan *Weekly Meeting* dengan media *Video Conference* membutuhkan kuota *Bandwidth* yang besar dan stabil, maka setiap Kanwil Ditjen Perbendaharaan dihimbau membatasi penggunaan intranet dan internet oleh pejabat/pegawai hanya untuk keperluan kedinasan terutama pada saat pelaksanaan *Video Conference* tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Haryana

NIP. 19600603 198502 1 0012

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perbendaharaan